

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

**Judul** : **PROGRAM WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)  
SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN  
BANTUL**

**Nama** : Singgih Norma Wardi

**NIM** : 15401241050

**Prodi** : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 14 Agustus 2020

Reviewer

Dr. Suharno, M.Si

NIP. 19680417 200003 1 001

Dosen Pembimbing

Dr Eny Kusdarini, S.H., M.Hum

NIP. 19600304 198601 2 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

## PROGRAM WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE) SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL

### WOMEN'S PROGRAM FOR SOCIAL ECONOMIC VULNERABILITY (WRSE) AS THE INTENT OF IMPLEMENTATION POVERTY TREATMENT POLICY IN BANTUL DISTRICT

by: Singgih Norma Wardi dan Eny Kusdarini

[singgihwardi@gmail.com](mailto:singgihwardi@gmail.com)

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS Universitas Negeri Yogyakarta

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan program bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bantul, menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan program bantuan WRSE di Kabupaten Bantul, dan menemukan upaya Dinsos P3A Kabupaten Bantul mengatasi hambatan terkait dengan program tersebut. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun subjek penelitian ini yaitu Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* data. Sedangkan analisis data menggunakan model analisis data induktif berupa pengumpulan data, reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Bantuan WRSE di Kabupaten Bantul belum berjalan sesuai dengan isi kebijakan. Komunikasi, disposisi dan struktur organisasi yang ada pada birokrasi sudah berjalan dengan baik, namun untuk sumber daya yang ada masih belum mencukupi kebutuhan. (2) Hambatan dari program tersebut yakni rendahnya motivasi, minimnya pengajuan proposal program bantuan WRSE, kurang efektifnya pengelolaan dana program bantuan WRSE oleh para penerima bantuan, serta rangkap jabatan dalam pendampingan program bantuan WRSE. (3) Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan melaksanakan bimbingan teknis, melakukan jemput bola, melakukan pendampingan dalam pembelanjaan dana serta menggunakan Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) sebagai pendamping program bantuan WRSE.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Penanggulangan Kemiskinan, Program Bantuan WRSE.*

#### ABSTRACT

*This study aims to identify the implementation of the policy of the Social and Economic Vulnerable Women (WRSE) assistance program in reducing poverty in Bantul Regency, analyze the obstacles in the implementation of the WRSE assistance program policies in Bantul Regency, and find the efforts of Dinsos P3A Bantul Regency to overcome the obstacles associated with the program. . This type of research is a descriptive study using a qualitative approach. The subject of this research is data collection techniques, namely interviews and documentation. Check the validity of the data using the cross check data technique. Meanwhile, data analysis used an inductive data analysis model in the form of data collection, data reduction, data display and conclusion drawing. The results showed that: (1) The implementation of the Poverty Reduction Policy through the WRSE Assistance Program in Bantul Regency has not yet been implemented according to the contents of the policy. The communication, disposition and organizational structure in the bureaucracy have been going well, but the available resources are still insufficient. (2) The obstacles to this program are low motivation, minimal submission of WRSE assistance program proposals, ineffective management of WRSE aid program funds by beneficiaries, and concurrent positions in WRSE assistance program assistance. (3) Efforts to overcome these obstacles are by implementing technical guidance, picking up balls, providing assistance in spending funds and using Disaster Response Cadets (TAGANA) as a companion to the WRSE assistance program.*

**Keywords:** *Implementation, Poverty Reduction, WRSE Assistance Program.*

#### PENDAHULUAN

Di dunia ini tidak ada satu pun negara yang diproklamasikan tanpa cita-cita

yang luhur, karena di setiap cita-cita itulah terletak kepentingan bersama yang diikat secara kuat untuk menggapai tujuan

(Yustika, 2002). Begitu pula dengan bangsa Indonesia yang didirikan oleh *founding fathers* puluhan tahun silam. Selama masa tersebut banyak hal yang dilakukan oleh negara untuk menunaikan cita-cita kemerdekaan yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD RI 1945. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam proses memajukan kesejahteraan umum, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kemiskinan.

Kemiskinan digambarkan dalam situasi dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan. Rendahnya tingkat pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2005: 121). Permasalahan kemiskinan tidak hanya melibatkan faktor ekonomi saja, akan tetapi juga melibatkan beberapa faktor lainnya seperti sosial, budaya dan politik. Masalah kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat proses pembangunan serta perkembangan suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih terjerat masalah sosial tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 ada sebanyak 25,95 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu orang, dari yang sebelumnya tercatat sebesar 26,58 juta orang pada September 2017. Persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2018 sebesar 7,02 persen, juga turun dibandingkan September 2017 sebesar 7,26 persen. Sama halnya dengan di pedesaan, di mana persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>).

Menurut Soetomo (2015:326) untuk mengatasi masalah kemiskinan, harus diperhatikan terlebih dahulu latar belakang dan sumber masalahnya. Apabila penyebab kemiskinan merupakan akibat dari cacat dan kelemahan individu, maka strategi yang digunakan untuk pemecahannya akan lebih ditekankan pada usaha untuk mengubah aspek manusia sebagai individu atau warga masyarakat. Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat akan lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas manusianya sehingga akan dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya peningkatan taraf hidupnya. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya dilakukan semenjak dasawarsa 1970-an. Menurut Prabowo dan Wurjanto sebagaimana dikutip Susanto (2006:19) sekurang-kurangnya sudah ada 3 corak usaha mengentaskan masyarakat miskin, yakni pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pendekatan berbasis hak.

Pemerintah Indonesia mempunyai beberapa program untuk mengurangi angka kemiskinan, diantaranya program pengentasan kemiskinan, program bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu contoh program pemerintah berbasis bantuan sosial. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (<http://pkh.kemsos.go.id>).

PKH juga diberikan pada masyarakat Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul memetakan ada tiga permasalahan sosial terbesar yang dihadapi wilayahnya. Permasalahan tersebut yakni tingginya angka kemiskinan, anak terlantar dan perempuan korban kekerasan. Berdasarkan data dari BPS angka kemiskinan di Kabupaten Bantul tergolong tinggi sejak tahun 2015 hingga 2018, yakni 160.15 ribu orang, 142.76 penduduk miskin, 139.67 ribu orang dan 134.84 ribu orang penduduk miskin. (<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/>

[08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html](https://doi.org/10.30605/jurnal-pendidikan-kewaraganeeraan-dan-hukum.v9i4.350)).

Permasalahan paling banyak yang ada di Bantul meliputi tiga masalah yakni fakir miskin, anak telantar, dan korban kekerasan. Masalah kekerasan terhadap perempuan memiliki kaitan dengan persoalan kemiskinan. Masalah ini sering ditemukan pada masyarakat menengah ke bawah. Keadaan ekonomi keluarga yang tidak mapan berhadapan dengan kebutuhan hidup yang terus bertambah rentan sekali terjadi kekerasan. Derita ekonomi yang berat tersebut berakibat pada lahirnya penelantaran, eksploitasi, dan tindak kekerasan terhadap perempuan yang bisa berujung pada perceraian.

Hal tersebut menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Wanita yang fungsi sosialnya terganggu, berakibat pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau ekonominya. Terganggunya fungsi sosial yang bersangkutan berakibat juga kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya. Insiden kemiskinan baik secara relatif atau absolut adalah tinggi di kalangan wanita terutama bagi wanita yang menjadi kepala rumah tangga. Bagi wanita yang bercerai hidup atau mati, mereka bisa menjadi miskin serta merta jika terpaksa menanggung anak tanpa nafkah atau harta yang ditinggalkan. Kemiskinan di kalangan ibu tunggal antara aspek yang menjadi perhatian pihak pemerintah dalam perumusan strategi pengentasan kemiskinan (Idris dan Selvaratnam, 2012). Pada akhirnya wanita yang bersangkutan akan mengalami kerawanan dalam hal sosial dan ekonomi. Adanya program bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) bertujuan untuk membantu wanita rawan sosial ekonomi, agar dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pada tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul meningkat ketimbang tahun 2017. Berdasarkan data Dinsos P3A Bantul, sejak Januari hingga November tahun 2018, angka kekerasan mencapai 195 kasus, padahal sepanjang tahun 2017 hanya

mencapai 167 kasus yaitu itu terdiri dari 75 kasus menimpa anak-anak usia 0-13 tahun, 19 kasus menimpa remaja, sedangkan sisanya menimpa perempuan dewasa. (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/2/04/511/956771/duh-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bantul-naik-dari-tahun-lalu>). Berkaitan dengan tingginya tingkat kekerasan pada perempuan, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalankan program bantuan sosial WRSE yang sudah dimulai sejak tahun 2013.

Program bantuan WRSE dalam pelaksanaannya yang dimulai sejak tahun 2013, setiap kecamatan di Kabupaten Bantul memiliki beberapa koordinator dan pendamping program bantuan wanita rawan sosial ekonomi. Setiap satu pendamping, membimbing 10-15 orang penerima bantuan wanita rawan sosial ekonomi. Terdapat sekitar enam puluh delapan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program nasional tersebut dan menelan anggaran kisaran Rp 129 miliar. Sementara itu, dari ribuan KPM ada sekitar 196 perempuan yang menerima bantuan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Pemerintah Kabupaten Bantul menganggarkan dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) untuk program tersebut, setiap orang akan menerima bantuan sebesar dua juta rupiah (<https://krjogja.com>).

Pelaksanaan program bantuan WRSE di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Program bantuan sosial WRSE merupakan program pendampingan dari PKH. Sasaran dari program tersebut yaitu janda atau perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan anak, serta hanya memiliki satu sumber penghasilan. Harapannya dengan bantuan tersebut peserta program bantuan WRSE diharapkan dapat mengembangkan usahanya atau membuka usaha guna meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat mengatasi kemiskinan. Landasan hukum dari pelaksanaan program bantuan sosial WRSE yaitu Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pasal tersebut berbunyi program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Menurut keterangan Ibu Yayuk selaku ketua koordinator program bantuan WRSE Kabupaten Bantul, program bantuan WRSE berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kalau PKH merupakan program dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh Kementerian Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan program bantuan WRSE merupakan program dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Penerima bantuan dari program ini merupakan anggota dari Program Keluarga Harapan. Tujuan dari program bantuan WRSE, yaitu untuk menambah penghasilan dari keluarga penerima bantuan melalui pengembangan usaha-usaha mikro meningkatkan perekonomiannya sehingga kesejahteraan keluarga dari penerima bantuan dapat meningkat.

Dalam pelaksanaannya program bantuan WRSE mengalami berbagai masalah. Masalah yang pertama yakni pelatihan skill terhadap penerima bantuan kurang efektif. Masalah selanjutnya yakni, minimnya warga yang mengajukan proposal bantuan, hal tersebut berdasarkan data di lapangan, tahun 2018 jumlah orang yang mengajukan sebanyak 196 orang, sedangkan tahun 2019 dengan kuota 300, yang mengajukan hanya 176 orang. Pendamping atau kordinator bagi penerima bantuan wanita rawan sosial ekonomi, memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan program tersebut. Hal tersebut karena pendamping harus dapat

mensosialisasikan program bantuan WRSE kepada para penerima bantuan mengenai program bantuan sosial tersebut, agar dapat mengelola serta memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. Keaktifan dan keuletan pendamping dalam membimbing dan menjalin komunikasi dengan para penerima bantuan, juga mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

Pengelolaan bantuan kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya program bantuan WRSE, dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan dana bantuan yang seharusnya digunakan penerima bantuan untuk modal usaha atau mengembangkan usaha. Kadang malah digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan wanita rawan sosial ekonomi sebagai implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang penanggulangan kemiskinan. Dinsos P3A sebagai instansi yang berwenang melaksanakan program bantuan WRSE, memegang peranan penting dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul terutama kemiskinan yang terjadi pada wanita yang memiliki kerawanan sosial dan ekonomi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggambarkan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilaksanakan Dinsos P3A Kabupaten Bantul dan Kecamatan Sanden. Waktu pelaksanaan penelitian ini dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Dimana penentuan subjek dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria subjek penelitian ini adalah 1) pejabat di Dinsos P3A Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan, pengetahuan, pengalaman dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

mengenai pelaksanaan program bantuan WRSE dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bantul. 2) warga atau seseorang yang secara langsung menerima program bantuan wanita rawan sosial ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen. Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya daftar penerima program bantuan WRSE, struktur organisasi Dinsos P3A dan perda penanggulangan kemiskinan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *crosscheck*.

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah analisis yang dilakukan dari pengumpulan data, reduksi data, display data. Display data yaitu penyajian data yang telah dikategorisasikan kemudian disajikan ke dalam narasi konstruktif yang berupa informasi mengenai hal-hal yang dikaitkan dengan masalah penelitian. dan penarikan kesimpulan. Data dalam bentuk narasi kemudian untuk menginterpretasikan data secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan (Burhan Bugin, 2003:70). Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Program Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bantul.**

Menurut Rozali Abdullah (2011: 132-133) Peraturan Daerah yang baik itu adalah yang memuat ketentuan anatara lain: (a) Memihak kepada kepentingan rakyat banyak; (b) Menjunjung tinggi hak asasi ; (c) Berwawasan lingkungan dan budaya. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul. Implementasi kebijakan seperti yang

diungkapkan Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014: 148) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau keluaran yang nyata. Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinsos P3A Kabupaten Bantul terkait penanggulangan kemiskinan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, tujuan dari program penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Demi mewujudkan tujuan dari peraturan daerah tersebut, maka pemerintah melalui Dinsos P3A Kabupaten Bantul melaksanakan program bantuan WRSE untuk menanggulangi kemiskinan. Bidang Dinsos P3A yang berwenang dalam penanggulangan kemiskinan adalah bidang bantuan dan jaminan sosial. Bidang tersebut terdiri dari dua seksi yakni, seksi perlindungan dan jaminan sosial serta seksi bantuan fakir miskin dan korban bencana.

Dinsos P3A Kabupaten Bantul selaku pelaksana program tersebut menetapkan kriteria penerima bantuan WRSE. Kriteria tersebut antara lain wanita sudah menikah atau janda yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS), serta wanita yang masuk kategori penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan program bantuan WRSE, pada tahap awal yakni Dinsos P3A Kabupaten Bantul menyeleksi peserta PKH yang masuk kategori WRSE, selanjutnya para calon penerima bantuan yang sudah terseleksi didampingi pendamping WRSE membuat permohonan proposal bantuan WRSE untuk diajukan. Pengajuan proposal di tahun 2018, maka pencairan dana bantuan dilakukan di tahun 2019 berlaku seterusnya. Dinsos P3A selanjutnya melakukan proses

penganggaran, diteruskan dengan pelaksanaan bimbingan teknis untuk pencairan dana bantuan,

Selanjutnya Dinsos P3A membuat Surat Keputusan (SK) penerima program bantuan WRSE. Kemudian para calon penerima bantuan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan WRS. Dinsos P3A berikutnya memberikan bantuan kepada para penerima bantuan WRSE untuk dibelanjakan kebutuhan terkait dengan usaha yang akan mereka jalankan. Langkah terakhir yang dilakukan Dinsos P3A Kabupaten Bantul adalah monitoring terkait usaha yang dijalankan para penerima program bantuan WRSE, dan dilanjutkan dengan evaluasi mengenai program tersebut.

Dalam memberikan informasi-informasi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE kepada masyarakat Kabupaten Bantul, Dinas Sosial P3A melakukan sosialisasi melalui media elektronik. Dinsos P3A dalam melakukan sosialisasi terkait program bantuan WRSE bekerja sama dengan Bantul Radio dan Radio Persatuan. Bentuk kerja sama tersebut yakni Dinsos P3A mengisi acara rutin di kedua radio itu, dengan mensosialisasikan program-program Dinsos P3A Kabupaten Bantul salah satunya program bantuan WRSE.

Dinsos P3A sebagai dinas yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE bekerja sama dengan berbagai pihak. Seperti pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pihak pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kecamatan, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BKAD), serta instansi bank. Dinsos P3A dalam menjalankan program bantuan WRSE bekerja sama dengan pendamping PKH berjumlah 17 orang, dikarenakan program bantuan WRSE di Kabupaten Bantul masih dalam lingkup PKH. Pendamping PKH tersebut juga merangkap sebagai pendamping WRSE.

Pendataan keluarga atau wanita yang layak menerima program bantuan WRSE di

Kabupaten Bantul. Sumber daya manusia yang terlibat hanyalah dari pendamping PKH dan TKSK. Hal tersebut dikarenakan TKSK dan pendamping PKH yang merangkap pendamping WRSE, lebih mengetahui kemampuan ekonomi para calon keluarga atau wanita yang layak menerima program bantuan WRSE. Pendataan tersebut dilakukan dengan sistem jemput data. Sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Banyaknya anggaran dana program bantuan WRSE tiap tahunnya fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah proposal yang terverifikasi untuk menerima dana program bantuan WRSE, setiap tahunnya selalu naik turun. Dalam hal jumlah anggaran, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau wanita yang masuk dalam daftar penerima program bantuan WRSE menerima dana sebesar dua juta rupiah. Adanya sumber daya finansial yang berasal dari APBD membuat dana bagi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program WRSE di Kabupaten Bantul dapat dikatakan siap. Akan tetapi untuk kecukupannya sendiri, sumber daya finansial dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE ini masih belum mencukupi semua kebutuhan.

Berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan WRSE yang mengalami berbagai kekurangan dan hambatan. Dinsos P3A Kabupaten Bantul tetap berusaha mensiasatinya seperti memberdayakan pendamping PKH untuk mendampingi program bantuan WRSE. Dinsos P3A juga berkomitmen setiap tahun menganggarkan untuk pelaksanaan program bantuan WRSE, serta adanya kemauan Dinsos P3A untuk mengembangkan penerima program bantuan WRSE dari luar PKH. Hal tersebut dilakukan agar dapat membantu lebih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Bantul dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009:295). George C. Edwards III mengajukan empat variabel atau faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Suharno, 2010:188-190) variabel tersebut, antara lain: 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, 4. Struktur birokrasi.

Variabel tersebut sesuai dengan kondisi yang peneliti temukan di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan kemiskinan melalui program bantuan WRSE di Kabupaten Bantul. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Bantuan WRSE di Kabupaten Bantul belum berjalan sesuai dengan isi kebijakan. Komunikasi, disposisi dan struktur organisasi yang ada pada birokrasi sudah berjalan dengan baik, namun untuk sumber daya yang ada masih belum mencukupi kebutuhan. Sumber daya manusia seperti pendamping untuk para penerima program bantuan WRSE masih memberdayakan pendamping dari PKH. Sama halnya dengan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE yang masih belum sepenuhnya mencukupi karena masih banyak kekurangan. Selain itu dibuktikan juga dengan kurangnya partisipasi masyarakat, terbatas anggaran dana dan pengelolaan dana program bantuan WRSE yang kurang efektif.

Beberapa variabel terkait dengan isi kebijakan dalam Model Merilee S. Grindle. (Suharno, 2010:190-191), sesuai dengan kondisi yang peneliti temukan di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan kemiskinan melalui program bantuan WRSE di Kabupaten Bantul. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan kelompok sasaran yakni wanita rawan sosial ekonomi sudah

termuat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Variabel kedua apakah letak sebuah program sudah tepat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE sudah tepat dipegang oleh Dinsos P3A Kabupaten Bantul. Hal tersebut dikarenakan Dinsos P3A Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, tugas, fungsi dan tata kerja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bantul.

Ketiga, variabel apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementasinya dengan rinci. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam peraturan daerah tersebut telah menyebut secara rinci pelaksana program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan program bantuan WRSE yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang menanggulangi kemiskinan dalam hal ini yaitu Dinsos P3A Kabupaten Bantul.

### **B. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan WRSE untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bantul**

Terdapat banyak masalah yang menghambat Dinsos P3A dalam melaksanakan program bantuan WRSE. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi:

1. Rendahnya motivasi para penerima program bantuan WRSE untuk maju

Hal itu dikarenakan program tersebut adalah program berbasis

pemberdayaan masyarakat yang nantinya bertujuan agar masyarakat penerima bantuan WRSE dapat mandiri dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari usaha yang mereka jalankan. Ketika para penerima program bantuan WRSE tidak memiliki motivasi atau niatan untuk mengembangkan usaha yang mereka bangun, tentunya usahanya akan stagnan

## 2. Minimnya pengajuan proposal program bantuan WRSE

Penurunan pengajuan proposal mengakibatkan para calon penerima program bantuan WRSE juga akan menurun. Hal tersebut berdampak pada waktu yang dibutuhkan Dinsos P3A Kabupaten Bantul dalam menanggulangi kemiskinan khususnya bagi wanita rawan sosial ekonomi akan membutuhkan waktu yang lama.

## 3. Kurang efektifnya para penerima bantuan program WRSE dalam mengelola bantuan WRSE.

Hal tersebut dikarenakan uang bantuan program WRSE berwujud tunai, sehingga para penerima bantuan lebih memilih membelanjakan bantuan tersebut untuk keperluan pribadi daripada untuk membeli keperluan yang berkaitan dengan proposal yang mereka ajukan. Perilaku konsumtif dari para penerima bantuan program WRSE tersebut, dapat menghambat upaya Dinsos P3A Kabupaten Bantul dalam menanggulangi kemiskinan melalui program bantuan WRSE.

## 4. Hambatan lainnya dalam pelaksanaan program bantuan WRSE adalah pendamping PKH yang merangkap sebagai pendamping WRSE.

Hal ini dikarenakan para pendamping PKH kadang mengabaikan tugas mereka yang juga merangkap sebagai pendamping program bantuan WRSE. Rangkap jabatan tersebut menghambat pelaksanaan program bantuan WRSE. Hal tersebut dikarenakan pendampingan kepada para penerima program bantuan WRSE menjadi kurang optimal, sebab bukan menjadi prioritas mereka.

## C. Upaya Dinsos P3A dalam Mengatasi Hambatan Terkait dengan Program Bantuan WRSE di Kabupaten Bantul

Akibat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE di Kabupaten Bantul maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Dinsos P3A Kabupaten Bantul untuk mengatasi hambatan-hambatan terkait pelaksanaan program bantuan WRSE yaitu:

### 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Melaksanakan bimbingan teknis kepada para calon penerima bantuan WRSE. Bimbingan teknis tersebut berupa bimbingan tentang pengelolaan usaha, manajemen pengelolaan keuangan, serta motivasi-motivasi dengan nilai keagamaan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta jiwa kewirausahaan para penerima bantuan program WRSE agar lebih semangat dalam memajukan usaha yang mereka jalankan.

### 2. Melakukan upaya sosialisasi *door to door* kepada para anggota WRSE

Upaya selanjutnya yakni dengan melakukan upaya *door to door* atau upaya jemput bola guna memberikan sosialisasi kepada para anggota WRSE. Proses ini dilakukan Dinsos P3A dengan mendatangi langsung rumah para anggota WRSE untuk memberikan sosialisasi terkait program bantuan WRSE dan juga memberikan motivasi kepada para penerima program bantuan WRSE, agar terpacu dalam mengajukan proposal bantuan.

### 3. Melakukan pendampingan dalam pembelanjaan dana bantuan

Kurang efektifnya para penerima program bantuan WRSE dalam mengelola dana bantuan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program bantuan WRSE. Upaya yang dilakukan oleh Dinsos P3A Kabupaten Bantul untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan melakukan pendampingan terhadap para penerima program bantuan WRSE dalam membelanjakan dana bantuan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyelewangan dana bantuan saat pembelanjaan.

4. Menggunakan Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) sebagai pendamping WRSE.

Upaya Dinsos P3A dengan menggandeng TAGANA sebagai pendamping WRSE, bertujuan agar pendampingan bagi wanita rawan sosial ekonomi bisa lebih optimal, sehingga tujuan dari pelaksanaan program bantuan WRSE dapat tercapai. Dinsos P3A Kabupaten Bantul menggandeng TAGANA sebagai pendamping WRSE, karena tahun 2021 program bantuan WRSE akan berdiri sendiri tidak dibawah lingkup PKH sehingga pendamping WRSE tidak harus dari pendamping PKH. Alasan lainnya karena TAGANA selain sebagai relawan bencana juga bisa menjadi pendamping sosial yaitu pendamping WRSE.

## Saran

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

- a. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Bantuan WRSE di Kabupaten Bantul belum berjalan sesuai dengan isi kebijakan. Komunikasi, disposisi dan struktur organisasi yang ada pada birokrasi sudah berjalan dengan baik, namun untuk sumber daya yang ada masih belum mencukupi kebutuhan. Sumber daya manusia seperti pendamping untuk para penerima program bantuan WRSE masih memberdayakan pendamping dari PKH. Sama halnya dengan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE yang masih belum sepenuhnya mencukupi karena masih banyak kekurangan. Selain itu dibuktikan juga dengan kurangnya partisipasi masyarakat, terbatas anggaran dana dan pengelolaan dana program bantuan WRSE yang kurang efektif.
- b. Hambatan dari implementasi kebijakan penanggulangan

kemiskinan melalui program bantuan WRSE di Kabupaten Bantul yaitu rendahnya motivasi para penerima program bantuan WRSE yang menyebabkan usaha yang dijalankan stagnan, minimnya pengajuan proposal program bantuan WRSE yang menghambat pelaksanaan program bantuan WRSE dan kurang efektifnya pengelolaan dana program bantuan WRSE oleh para penerima bantuan, serta rangkap jabatan dalam pendampingan program bantuan WRSE.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE di Kabupaten Bantul yaitu dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada para penerima program bantuan WRSE untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para penerima bantuan, melakukan sistem jemput bola kepada para anggota WRSE agar terpacu untuk mengajukan proposal bantuan dan melakukan pendampingan dalam pembelanjaan dana program bantuan WRSE, agar tidak terjadi penyelewangan. Upaya yang terakhir yakni menggunakan Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) sebagai pendamping program bantuan WRSE supaya pendampingan lebih optimal dan efektif.

### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran peneliti kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Bantul mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan WRSE yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi program bantuan WRSE kepada masyarakat Kabupaten Bantul melalui media cetak, serta meningkatkan sosialisasi melalui media elektronik lewat sosial

- media kekinian seperti facebook, twitter dan Instagram.
2. Memberikan pelatihan-peletihan berupa motivasi berwirausaha, pengelolaan dana bantuan serta pemasaran produk kepada para penerima program bantuan WRSE
  3. Merekrut anggota baru untuk menjadi pendamping program bantuan WRSE, agar proses pendampingan penerima program bantuan WRSE berjalan optimal. Saran dapat berupa masukan bagi peneliti berikutnya, dapat pula rekomendasi implikatif dari temuan penelitian
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdullah, Rozali. (2011). *Pelaksanaan otonomi luas*. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada.
- Afan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2011). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Idris, N.A.H., Selvaratnam, D.P. (2012). *Program pembasmian kemiskinan dalam kalangan ibu tunggal: analisis penyertaan dan keberkesanan: prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia*. VII (1), 248 – 259, ISSN: 2231-962X
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Soetomo. (2015). *Masalah sosial dan upaya pencegahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryawati Chriswardani. (2005). *Memahami kemiskinan secara multidimensional, Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, Volume 08, No. 03, Edisi September 121-129
- Susanto H. (2006). *Dinamika penanggulangan kemiskinan tinjauan orde baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik (teori, proses, dan studi kasus)*. Jakarta: PT Buku Seru
- Yustika, Ahmad Erani. (2002). *Negara vs kaum miskin*. Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
- Peraturan Daerah Bantul Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan [https://krjogja.com/web/news/read/81837/Bantul\\_Hadapi\\_Tiga\\_Masalah\\_Sosial](https://krjogja.com/web/news/read/81837/Bantul_Hadapi_Tiga_Masalah_Sosial) diakses pada Kamis, 21 Februari 2019 pukul 13.20 WIB)
- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html>, diakses tanggal 1 April 2019
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> diakses pada Kamis, 21 April 2019 pukul 10.00 WIB).
- <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1> diakses pada Selasa, 23 April 2019 pukul 10.50 WIB
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/04/511/956771/duh-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bantul-naik-dari-tahun-lalu>